

DAFTAR ISI

Pengantar	v
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Peta	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Singkatan	xviii
Peta Lokasi Penelitian	xx
Intisari	xxi
<i>Abstract</i>	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.1.1 Kompleksitas Otonomi Daerah dan Permasalahan Desentralisasi Kepurbakalaan di Indonesia	2
1.1.2 Kepurbakalaan di Indonesia dan Permasalahan Manajemen Sumberdaya Budaya pada Era Otonomi Daerah	14
1.1.3 Kabupaten Tanah Datar, Khazanah Kepurbakalaan, dan Permasalahan Penyelenggaraan Urusannya di Era Otonomi Daerah	22
1.2 Pertanyaan, Tujuan, dan Manfaat Penelitian	25
1.3 Sumber Data, Cara Penelitian, dan Penyajian	26
 BAB II KABUPATEN TANAH DATAR: SEJARAH PEMERINTAHAN DAN KHAZANAH KEPURBAKALAANNYA	 29
2.1 Pengantar	29
2.2 Sejarah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar	29
2.2.1 Tanah Datar Masa Kolonial	30
2.2.2 Tanah Datar Masa Kemerdekaan	33
2.3 Khazanah Kepurbakalaan Kabupaten Tanah Datar	38
2.3.1 Jumlah dan Sebaran Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar	38
2.3.2 Corak Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar	42
2.3.2.1 Kepurbakalaan Bercorak Pra-Sejarah	44
2.3.2.2 Kepurbakalaan Bercorak Hindu-Budha	45
2.3.2.3 Kepurbakalaan Bercorak Islam	48
2.3.2.4 Kepurbakalaan Bercorak Kolonial	51
2.3.2.5 Kepurbakalaan Bercorak Perjuangan	53
2.3.2.6 Kepurbakalaan Bercorak Vernakular	56
2.4 Kesimpulan Bab	58

BAB III DARI SENTRALISASI KE DESENTRALISASI: PENYE- LENGGARAAN URUSAN KEPURBAKALAN DI KABU- PATEN TANAH DATAR 1974–2011	59
3.1 Pengantar	59
3.2 Era Sentralisasi: Penyelenggaraan Urusan Kepurbakala- an di Kabupaten Tanah Datar Tahun 1974–1999	60
3.2.1 Pemerintah Pusat dan UPT Purbakala sebagai Aktor Utama	60
3.2.2 UU No. 5/1992 dan Pengukuhan Sentralisasi Penye- lenggaraan Urusan Kepurbakalaan	64
3.3 Menuju Desentralisasi: Penyelenggaraan Urusan Kepur- bakalaan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999–2007 ...	67
3.3.1 UU No. 22/1999, PP 25/2000, dan Perubahan Para- digma Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan	67
3.3.2 Menata Institusi dan Mencoba Otonomi: Respons Awal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	70
3.3.3 UPT Purbakala dan Metamorfose Organisasi: Respons Pemerintah Pusat	79
3.3.4 UU No. 32/2004, PP No. 38/2007, dan Upaya Penguat- an Kebijakan Desentralisasi Kepurbakalaan	82
3.4 Melanjutkan Otonomi: Penyelenggaraan Urusan Kepur- bakalaan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008–2011 ...	85
3.4.1 Penetapan Urusan Kepurbakalaan dan Penguatan Kelembagaan: Respons Lanjutan Pemerintah Kabupa- ten Tanah Datar	85
3.4.2 Pelemahan Kelembagaan: Kebijakan Kontraproduktif Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	90
3.4.3 Permenbudpar No. PM.49/UM.001/MKP/2009, UU No. 11/2010, dan Upaya Pemantapan Kebijakan Desen- tralisasi Kepurbakalaan	92
3.4.4 Dan UPT Purbakalapun Tetap Berjalan seperti Biasa- nya: Aktivitas BP3 Batusangkar untuk Kabupaten Tanah Datar 2008–2011	99
3.5 Kesimpulan Bab	100
 BAB IV JALAN TERJAL DESENTRALISASI: DINAMIKA PENYE- LENGGARAAN URUSAN KEPURBAKALAN DI KABU- PATEN TANAH DATAR 1999–2011	 103
4.1 Pengantar	103
4.2 Kebijakan Kelembagaan: Antara Responsivitas dan Inkonsistensi	104
4.3 Kebijakan Penganggaran: Antara Keterbatasan Anggaran dan Komitmen	107
4.4 Kognisi, Persepsi, dan <i>Interest</i> : Realitas Pemikiran dan Komitmen Pejabat Daerah	109

4.5	Aparatur Pelestari Cagar Budaya: Antara Ketersediaan dan Kompetensi	114
4.6	Koordinasi dan Komunikasi: Problem Hubungan Pusat dan Daerah	115
4.7	Korpus Kebijakan Desentralisasi Kepurbakalaan: Aturan Main yang Belum Jelas	116
4.71	Problem Keragaman Definisi dan Peristilahan Kepurbakalaan	116
4.72	Problem Pemeringkatan Cagar Budaya	119
4.8	Kebijakan Sumber Daya: Blunder Desentralisasi Kepurbakalaan	125
4.9	Sentralisasi dan Desentralisasi Kepurbakalaan: Opini Pejabat Pusat dan Daerah	127
4.10	Kesimpulan Bab	132
BAB V	PENUTUP	133
5.1	Pengantar	133
5.2	Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar pada Era Otonomi Daerah : Kesimpulan dan Refleksi	133
5.3	Masa Depan Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Indonesia : Bercermin dari Kasus di Kabupaten Tanah Datar	138
	Daftar Pustaka	143
	Daftar Nara Sumber	158
	Lampiran	159
	Biodata Penulis	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	37
Tabel 2.2	Perkembangan Jumlah Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kabupaten Tanah Datar Tahun 1990–2012	39
Tabel 2.3	Jumlah, Sebaran, dan Nama-nama Peninggalan Purbakala di Kabupaten Tanah Datar per kecamatan	40
Tabel 2.4	Klasifikasi Corak Peninggalan Purbakala di Kabupaten Tanah Datar	42
Tabel 3.1	Program, Kegiatan, dan Alokasi Anggaran Sektor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Datar TA 2002–2008	72
Tabel 3.2	Kegiatan yang Berhubungan dengan Urusan Kepurbakalaan di Sektor Pariwisata TA 2002–2008	77
Tabel 3.3	Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar oleh BP3 Sumbar-Riau TA 2001–2007	81
Tabel 3.4	Pembagian Urusan Kepurbakalaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (PP No. 38/2007)	84
Tabel 3.5	Urusan Kepurbakalaan yang Menjadi Kewenangan Pemkab Tanah Datar (Perdakab Tanah Datar No. 5/2008)	86
Tabel 3.6	Urusan Kepurbakalaan: Antara yang Diserahkan Pemerintah Pusat dengan yang Diterima Pemkab Tanah Datar	87
Tabel 3.7	Program, Kegiatan, dan Alokasi Anggaran Sektor Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Tanah Datar TA 2009–2010	89
Tabel 3.8	Program, Kegiatan, dan Alokasi Anggaran Sektor Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Tanah Datar TA 2011–2012	91
Tabel 3.9	Perincian Pedoman Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Permenbudpar No. PM.49/UM.001/MKP/2009)	93
Tabel 3.10	Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan (UU No. 11/2010)	96
Tabel 3.11	Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya (UU No. 11/2010)	97
Tabel 3.12	Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar oleh BP3 Sumbar-Riau-Kepri TA 2008–2011	99

DAFTAR PETA

Peta 1	Indonesia, Sumatera Barat, dan Kabupaten Tanah Datar	xx
Peta 2	Sumatera Barat Tahun 1879	31
Peta 3	Sebaran Peninggalan Purbakala di Kabupaten Tanah Datar per kecamatan	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Kerangka Kerja Manajemen Sumberdaya Budaya	20
Gambar 2.1	Diagram perkembangan pemerintahan di Sumatera Barat dan Tanah Datar, 1937–1942	32
Gambar 2.2	Situs batu sandar <i>Medan nan Bapaneh</i> Batu Batikam	44
Gambar 2.3	Prasasti Kuburajo II, kondisi tahun 1879	46
Gambar 2.4	Prasasti Pagaruyung I dan II, kondisi tahun 1879	47
Gambar 2.5	Makam-makam ulama: Makam Haji Miskin, Makam Syekh Ibrahim Sebrai, dan Makam Tuanku Pamansiang	48
Gambar 2.6	Makam kerabat kerajaan Pagaruyung: Kompleks Makam Rajo Alam, Kompleks Makam Tuanku Gadih, dan Kompleks Makam Rajo Saruaso	48
Gambar 2.7	Makam kuna dengan nisan tipe menhir: Kompleks makam Talago Gunung dan Kompleks makam Koto Laweh	49
Gambar 2.8	Nisan Tipe Aceh di Kompleks makam Tuan Titah	49
Gambar 2.9	Masjid kuna beraliran Bodi Caniago: Masjid Tuanku Pamansiang dan Masjid Lima Kaum	50
Gambar 2.10	Masjid kuna beraliran Koto Piliang: Masjid Rao-Rao dan Masjid Sa'adah	50
Gambar 2.11	Surau kuna beraliran Koto Piliang: Surau Lubuk Bauk	51
Gambar 2.12	Bangunan kolonial yang dibangun pemerintah kolonial Belanda	52
Gambar 2.13	Bangunan kolonial yang dibangun penduduk setempat	52
Gambar 2.14	Bangunan kolonial yang dibangun pemerintah kolonial Jepang	52
Gambar 2.15	Lokasi Bekas Pemancar Radio PDRI YBJ-6 di Lintau Buo (Utara)	54
Gambar 2.16	Rumah tempat perundingan delegasi RI-Belanda sebelum penyerahan kekuasaan 1949 di Tanah Datar	55
Gambar 2.17	Balairung Sari Tabek di Pariangan, sebuah balairung kuna terpanjang di Sumatera Barat	56
Gambar 2.18	Ragam rumah adat Minangkabau: Rumah Gadang Dt. Bandaro Kuniang dan Rumah Gadang di Sumpur	57
Gambar 2.19	Ragam rumah adat Minangkabau: Rumah Gadang Kampai Nan Panjang di Rambatan	57
Gambar 3.1	Penyelenggaraan urusan keurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar TA 1977/1978–1989/1990	61
Gambar 3.2	Ragam aktivitas penyelenggaraan urusan keurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar oleh SPSP Sumbar-Riau TA 1990/1991–1999/2000	63
Gambar 3.3	Jalur Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan pada Era Sentralisasi (1974–1999)	65
Gambar 3.4	Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kab. Tanah Datar (2001–2003)	70

Gambar 3.5	Struktur organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Tanah Datar (2003–2008)	71
Gambar 3.6	Papan penunjuk arah dan papan informasi objek wisata sejarah dan purbakala yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya	78
Gambar 3.7	Buku laporan hasil inventarisasi makam tokoh sejarah lokal yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Tahun 2004	78
Gambar 3.8	Salah satu tampilan informasi wisata sejarah dan purbakala dengan pemanfaatan TI (website)	78
Gambar 3.9	Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tanah Datar (2008–2010)	88
Gambar 3.10	Struktur Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Tanah (2010–sekarang)	90
Gambar 4.1.	Salah satu gerbang masuk Kota Batusangkar dengan tulisan “Selamat Datang di Batusangkar Kota Budaya”	111
Gambar 4.2.	Model keterkaitan antar variabel dalam dinamika penyelenggaraan urusan keurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar	132

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Asdep	: Asisten Deputi
Bappeda & PM	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
BCB	: Benda Cagar Budaya
BP Budpar	: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
BP3	: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala
BPCB	: Balai Pelestarian Cagar Budaya
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPSIM	: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau
Budpar	: Kebudayaan dan Pariwisata
CB	: Cagar Budaya
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
Depbudpar	: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Depdikbud	: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Disbudpar	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Disbudparpora	: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
Disparhub	: Dinas Pariwisata dan Perhubungan
Disparsenibud	: Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya
Ditjenbud	: Direktorat Jenderal Kebudayaan
Ditlinbinjarah	: Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala
dkk.	: dan kawan-kawan
ed.	: editor
IAAI	: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia
Kab.	: Kabupaten
Kabid	: Kepala Bidang
Kadis	: Kepala Dinas
Kandep	: Kantor Departemen (tingkat kabupaten, kodya, dan kecamatan)
Kanwil	: Kantor Wilayah (tingkat provinsi)
Kasi	: Kepala Seksi
KBI	: <i>Kamus Bahasa Indonesia</i>
Kec.	: Kecamatan
Kemdikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenbudpar	: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Kepmendikbud	: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepri	: Kepulauan Riau
KITLV	: <i>Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies)</i>
Komda	: Komisariat Daerah
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia